

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan optimal. Perencanaan penanggulangan kemiskinan telah disusun dan dimuat dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan (SPKD), meskipun dalam proses integrasi dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD) belum maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan sebagai wadah komunikasi telah dibentuk meskipun belum memiliki agenda kerja tahunan. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan amanat regulasi namun belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara signifikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan secara rutin namun belum didukung dengan ketersediaan instumen dan format monev yang spesifik.
2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh berbagai faktor

penentu baik dari sisi positif dan sisi negatif. Faktor yang mempengaruhi dari sisi positif adalah ukuran dan tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh faktor lain yaitu sikap kecenderungan para pelaksana yang mendukung penuh pelaksanaan kebijakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memadai. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari sisi negatif adalah sumber daya anggaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat masih minim, meskipun sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai. Faktor karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam kebijakan khususnya bidang penanggung jawab dalam TKPK belum memiliki tupoksi yang spesifik serta komunikasi antar pelaksana kebijakan melalui rapat koordinasi masih minim dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengintegrasian secara komprehensif isu penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan , dengan cara memastikan strategi dan arah kebijakan serta program/kegiatan penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan secara

- konsisten dan berkelanjutan, dengan cara pengendalian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan
2. Terkait dengan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin, perlu adanya pendampingan terhadap setiap program/kegiatan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan dan menjaga keberlangsungannya, perlu untuk melakukan penguatan kapasitas kelompok, membangun kelembagaan usaha dengan memberi pemahaman terkait penataan administrasi, pengelolaan keuangan, akses teknologi informasi, *quality control* dan standarisasi mutu produk serta memastikan pasar agar berkelanjutan.
 3. Perlu adanya optimalisasi peran TKPK baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan
 4. Khusus di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah menetapkan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung program dan kegiatan yang melindungi kawasan tersebut , perlu adanya penetapan harga eceran tertinggi dalam setiap produk pertanian, perlu adanya peningkatan kualitas pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, memfasilitasi petani dan penggarap untuk memperbaiki sistem kerjasama sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan, pemerintah melalui BUMDes

- yang bergerak pada usaha pertanian didorong dan difasilitasi untuk bekerjasama dengan petani penggarap
5. Perlu adanya perbaikan tata kelola data penerima manfaat dalam hal ini DTKS, melalui optimalisasi peran masing-masing TKPKD untuk mengkoordinasikan dan mengawal proses verifikasi dan validasi disetiap kabupaten kota agar koordinasinya lebih maksimal sampai pada pemerintah desa dan kecamatan setempat, memaksimalkan pendampingan dari OPD teknis dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengawal proses verifikasi dan validasi, updating DTKS oleh Pemerintah Kab/Kota dan *Interoprabilitas* data maksudnya data tersebut dapat dibagi dan digunakan secara bersama oleh berbagai pihak dengan merumuskan daftar data prioritas pembangunan provinsi, yang digunakan bersama lintas sector dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 6. Perlu dilakukan revisi terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk disesuaikan dengan regulasi diatasnya, mengingat regulasi terkait penanggulangan kemiskinan baik Peraturan Presiden dan Permendagri sudah mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*.1–36. <http://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>
- Afifah, N. Y. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 51-60. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.95>
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Publik Profetik*, 04(2), 172–199. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/> article/download/2750/2594
- Anwar, Dionita Putri. Ati, N. U. dkk. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Mala. 14(3), 1–7.* <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/7913>
- Arsyad, A., Budi, R., & Suwasono, B. (2019). Management Analysis of West Surabaya Shipping Lines in Tanjung Perak Harbor of Surabaya. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 85(1), 405–411. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-01.49>
- Barrett, D., & Twycross, A. (2018). Data collection in qualitative research. *Evidence-Based Nursing*, 21(3), 63–64. <https://doi.org/10.1136/eb-2018-102939>

- Denny Wahyu Sendjaja, Gregorius Yorrie Rismanto, N. A. (2015). Public Policy Analysis on Performance Audit. *Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1 No. 1, 67–81. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.20>
- Dione, A. Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD Pada Bappeda Kota Bengkulu). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Dimas Sanjaya, B., A Kadir, S., & Bahri, F. (2019). Analisis Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 81–93. <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8888>
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Khofifah, N., Umi Ati, N., Suyeno. (2021). *Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) Nur Khofifah¹ , Nurul Umi Ati² , Suyeno³ Jurusan Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang* 15(3), 1–9. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/9991>
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Leksono, R. B., Kombaitan, B., Putro, H. P. H., Winarso, H., & Sutriadi, R. (2019). Pembangunan Konsensus: Solusi Perencanaan Di Bawah Tekanan? *Tataloka*, 21(3), 497.

<https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.497-520>

Maduretno, T. W., & Fajri, L. (2019). The effect of optimization learning resource based on Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC) on contextual learning to students' conceptual understanding of motion and force material. *Journal of Physics: Conference Series*, 1171(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1171/1/012012>

Mius, A., Suradinata, E., Ilham, M., & Djaenuri, H. M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 49–73. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.917>

Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>

Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>

Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljai, F. (2017). Strides in development of medical education. *Strides Dev Med Educ*, 14(3), 1–6. <https://doi.org/10.5812/sdme.67670.Research>

Oluyombo, & Onafowakan, O. (2018). Theories of Poverty and Rural Finance Policy in Nigeria. *Jigawa Journal of Politics*, 1(1), 130–144. https://www.researchgate.net/publication/332935700_Theories_of_Poverty_and_Rural_Finance_Policy_in_Nigeria

Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali.

- EP Unud*, 7(3), 416–444.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/37696/23655>
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.
[https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/ download/1/1](https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1)
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ripno, R., Nathalia, T. C., & Pramono, R. (2021). Waste Management in Supporting Sustainable Tourism Case Study of Touris Destination Malioboro Yogyakarta. *International Journal of Social, Policy and Law*, 2(2), 1–4. Retrieved from <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/37>
- Rohman, A., Sukiman, A., Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Ilmu Sosial*, 3(1), 71–84. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.709>
- Setijaningrum, E. (2017). Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya Integrated program design to overcome poverty in Surabaya. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(8), 13–19.
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/97661>
- Sopah, F., Kusumawati, W., Edo Wahyudi, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ukm Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Idea*, 2(6), 26-40.
<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i6.339>
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. [https://files.osf.io/v1/ resources](https://files.osf.io/v1/resources)

/6djph/providers/osfstorage/5a11b5456c613b0271d34ed3?action=download&direct&version=1

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1-17. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>

Wance, M. (2020). *Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik*. 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>

Widnyani, I. A. P. S. (2017). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 93–102. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa>

Wulan, Y. C., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). Implementasi Kebijakana Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 104–109. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3596>

W, P. S. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE (KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS) DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i1.281>

Zulkarnain, U. (2017). Analisis kebijakan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–13. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4068>

Buku

- Anggito, A., Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Barlian, E. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press
- Berg, L. B., Lune, H. 2017. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. England: Pearson
- Kadir, A. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada
- Nanga, M. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Kedeputian Bid Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas. 2018;1–80.
- Mahi, A.K., Trigunarso, I.S. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Revida, E., Hidayatulloh, N.A., Soetijono, K.I., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, I.M., Bahri, S., Pelu, F.M., Purba, S., Asmarianti. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo